

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REDAKSI PROGRAM MATA NAJWA DALAM
MEMBONGKAR KASUS KORUPSI DI PSSI**

Anton Bahtiar Rifa'i

Magister Komunikasi Politik Universitas Paramadina

abahtiar32@gmail.com

Abstrak

Program talkshow Mata Najwa mengangkat tema kasus suap dan pengaturan skor di PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia), dalam tayangan tanggal 28 November 2018 dan 19 Desember 2018 di Trans 7. Kedua episode itu secara diberi tajuk *PSSI Bisa Apa* dan *PSSI Bisa Apa Jilid 2*. Dalam tayangan tersebut, Mata Najwa menyajikan informasi tentang praktik suap dan pengaturan skor, serta mengungkap tokoh-tokoh yang diduga terlibat. Ternyata, tayangan ini berdampak pada kebijakan penegakan hukum. Polisi langsung merespon dengan membentuk Satgas Antimafia Bola. Para pengurus PSSI yang terlibat kemudian ditangkap.

Tayangan Mata Najwa yang mengangkat kasus korupsi PSSI merupakan pengejawantahan dari suatu kebijakan redaksi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, guna mengetahui faktor-faktor yang menunjang efektivitas kebijakan redaksi Mata Najwa dalam membongkar kasus korupsi di PSSI. Kemudian diketahui bahwa faktor-faktor tersebut adalah: independensi, kredibilitas program, serta profesionalitas tim redaksi redaksi yang di dalamnya mencakup profesionalitas kerja jurnalis, kedalaman riset dan eksklusivitas narasumber.

Kata Kunci: Kebijakan Redaksi, Mata Najwa, PSSI, Trans 7, Narasi TV.

Abstract

The Mata Najwa talk show program raised the theme of bribery and score-fixing at PSSI (Indonesian Football Association), in shows on 28 November 2018 and 19 December 2018 on Trans 7. Both episodes were titled PSSI Bisa Apa and PSSI Bisa Apa Jilid 2. In the program, Mata Najwa presented information about bribery practices and score-fixing, and revealed figures suspected of being involved. Apparently, this show had an impact on law enforcement policies. The police responded immediately by forming the Antimafia Task Force. Members of PSSI were then arrested.

The Mata Najwa talk show that reviewed the PSSI corruption policy are manifestations of editorial policy. This study uses a qualitative descriptive method, to understand the factors that support Mata Najwa's editorial policy in uncovering the problem of corruption in PSSI. These factors are: independence, credibility program, professionalism, research, and exclusivity of the resource persons.

Keywords: Editorial Policy, Mata Najwa, PSSI, Trans 7, Narasi TV.

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari instrumen demokrasi, pers Indonesia memiliki fungsi kontrol sosial. Ini dijamin dalam Undang-Undang Pokok Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian, pers bisa memberikan koreksi terhadap pemerintah dan lembaga publik, serta mencegah agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan.

Meski dijamin undang-undang, pada praktiknya kebebasan pers di Indonesia masih belum optimal. Menurut Reporters Without Borders (2020), dalam indeks kebebasan pers dunia tahun 2020, Indonesia hanya menduduki peringkat 119 dari 180 negara. Bahkan posisi Indonesia jauh di bawah Timor Leste, yang berada di urutan 78.

Dengan kondisi seperti itu, pers Indonesia dituntut untuk lebih mengoptimalkan fungsi kontrol sosial, dengan mengatasi segala hambatan yang ada. Program talkshow Mata Najwa, sejak awal berdiri, kerap menjalankan fungsi kontrol sosial. Ini dipraktikkan dengan cara memberikan koreksi terhadap penyimpangan pada lembaga negara dan lembaga publik. Bahkan seringkali tayangan Mata Najwa bisa mempengaruhi suatu kebijakan dan berdampak pada perubahan. Program yang dibawakan presenter Najwa Shihab ini berfokus pada tema-tema politik dan hukum. Di antara tayangan Mata Najwa yang berdampak pada kebijakan adalah saat mengangkat tema tentang kasus suap dan pengaturan skor di tubuh PSSI, yang ditayangkan di Trans 7 pada 28 November 2018 dan 19 Desember 2018. Tayangan tersebut secara berturut-turut diberi tajuk *PSSI Bisa Apa* dan *PSSI Bisa Apa Jilid 2*. Dalam tayangan di kedua episode tersebut, Mata Najwa menampilkan para narasumber yang mengungkap praktik-praktik suap dan pengaturan skor di liga sepak bola Indonesia.

Selain itu, Mata Najwa juga membeberkan bukti-bukti, serta menayangkan wawancara dan informasi eksklusif, terkait kasus suap dan pengaturan skor.

Beberapa hari setelah penayangan, sejumlah pejabat PSSI, yang disebut terlibat dalam kasus suap dan pengaturan skor, mengundurkan diri. Kasus suap dan pengaturan skor yang diangkat program Mata Najwa juga mendapat respon dari Polri dengan membentuk Satgas Antimafia Bola. Setelah dilakukan proses hukum, sejumlah pejabat PSSI ditangkap polisi. PSSI pun menggelar kongres untuk memilih pengurus baru.

Keberhasilan program Mata Najwa dalam membongkar kasus suap di tubuh PSSI, hingga berdampak pada proses penegakan hukum, menarik untuk dianalisa. Yang pasti, tayangan Mata Najwa tersebut merupakan pengejawantahan dari suatu kebijakan redaksi. Untuk itu, penulis akan meneliti faktor apa saja yang menunjang efektivitas kebijakan redaksi program Mata Najwa sehingga berhasil membongkar kasus suap dan pengaturan skor di tubuh PSSI, bahkan hingga berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum.

TINJAUAN LITERATUR

Kebijakan Redaksi

Produk jurnalistik, termasuk tayangan talkshow yang diproduksi lembaga pers, mengacu pada suatu kebijakan redaksi. Menurut Tebba (2005), kebijakan redaksi merupakan dasar pertimbangan suatu lembaga media massa, terutama media cetak, terhadap masalah aktual yang sedang berkembang. Jika suatu media massa tidak memiliki kebijakan redaksi, maka media massa tersebut dalam penyampaian berita-beritanya tidak akan konsisten.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kebijakan adalah: “Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).”

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan redaksi adalah pertimbangan (*judgement*) di lingkup redaksi yang dijadikan acuan dalam menyikapi suatu fenomena atau peristiwa, dan diwujudkan dalam suatu mekanisme kerja jurnalisisme. Karena itu, kualitas produk jurnalisisme suatu media sangat ditentukan oleh keputusan yang diambil dalam penentuan kebijakan redaksi.

Tanggung Jawab Media

Idealnya, produk jurnalisisme suatu media berfungsi sebagai alat menyampaikan informasi, mewakili dan menyuarakan kepentingan publik. Menurut Denis McQuail (1987), media harus menerima dan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu kepada masyarakat. Kewajiban-kewajiban ini pada umumnya dicapai dengan cara menetapkan standar profesi yang tinggi, berupa pemenuhan informasi, kebenaran, ketepatan, obyektivitas, dan keseimbangan (Baran & Davis, 2013, h. 74). Dari penjelasan ini, jelas sekali bahwa media bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi yang benar dan obyektif, serta diwujudkan dalam mekanisme kerja jurnalisisme yang profesional.

Seperti diatur dalam Ayat 1 Pasal 3 Undang-Undang Pokok Pers No.40 Tahun 1999, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dalam hal ini, penulis ingin memberikan penegasan pada fungsi kontrol sosial. Dengan menjalankan fungsi kontrol sosial, lembaga pers dapat memberikan kritik atau koreksi kepada pemerintah dan lembaga publik agar tidak

terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, media ikut berkontribusi terhadap keberlangsungan mekanisme *check and balance* dalam suatu sistem demokrasi.

Kebebasan Pers di Indonesia dan Tantangannya

Fungsi dan tanggung jawab lembaga pers sangat dipengaruhi oleh kualitas kebebasan pers. Dalam iklim pers yang bebas, media bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, termasuk dalam menjalankan kontrol sosial. Di Indonesia, sejak era reformasi, berbagai regulasi yang mengekang kebebasan pers sebenarnya sudah dicabut. Pemerintah tidak lagi berwenang membredel dan menyensor pers, setelah Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers disahkan.

Namun, regulasi yang menjamin kebebasan pers di Indonesia ternyata tidak beriringan dengan perbaikan kualitas kebebasan pers itu sendiri. Menurut Reporters Without Borders (2020), dalam indeks kebebasan pers dunia tahun 2020, Indonesia hanya berada di urutan 119 dari 180 negara. Bahkan posisi Indonesia jauh di bawah Timor Leste, yang berada di urutan 78.

Jika mengacu pada regulasi yang berlaku, dominasi kekuasaan negara terhadap pers di Indonesia memang sudah hapuskan. Namun praktiknya, dominasi terhadap media tidak berhenti. Yang terjadi hanyalah pergeseran dari dominasi pemerintah menjadi dominasi pemilik modal. Ishadi SK (2014), dalam buku *Media & Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*, menggambarkan tentang suatu era di Indonesia, ketika munculnya generasi jurnalis yang memiliki insting bisnis yang kuat, seperti Jacob Utama (*Kompas*), Goenawan Mohamad (*Tempo*), Dahlan Iskan (*Jawa Pos*), hingga Surya Paloh (*Media Indonesia*).

Pemilik media mempunyai kuasa untuk mengendalikan operasional media, melalui orang yang dipercaya menjalankan operasional suatu media. Menurut Murdock (1982), pengendalian berada pada pemilik modal yang sah. Pemilikan sah (*legal owner*) adalah orang yang dalam struktur organisasi perusahaan sebagai pimpinan yang biasanya dipilih dalam satu forum pengambilan keputusan di antara pemegang saham (Uda Rusadi, 2015, h. 21).

Pemilik media, selain membawa kepentingan pasar, seringkali juga merepresentasikan kepentingan politik, karena adanya afiliasi politik terhadap kekuatan politik tertentu. Sebagai contoh, Surya Paloh, pemilik Metro TV, adalah Ketua Umum Partai Nasdem. Hary Tanoesoedibjo, pemilik MNC Group, adalah Ketua Umum Partai Perindo. Surya Paloh dan Hary Tanoesoedibjo diketahui merupakan pendukung Joko Widodo di ajang Pilpres 2019. Sementara TV One dimiliki oleh keluarga Aburizal Bakrie. Pada Pilpres 2014, Aburizal Bakrie merupakan Ketua Umum Partai Golkar yang mendukung Prabowo Subianto di ajang Pilpres 2014.

Keterlibatan pemilik media dalam politik, tentu saja berpotensi menimbulkan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Bisa saja, pemberitaan suatu media disesuaikan dengan kepentingan politik pemiliknya. Setidaknya, ini tergambar ketika KPID DKI Jakarta (2019) mengungkapkan temuan bahwa, terkait pemberitaan Pilpres 2019, Metro TV menayangkan berita-berita yang tidak berimbang antara pasangan calon nomor urut 01 (Joko Widodo-Ma'ruf Amin) dan nomor urut 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno). Perbandingannya, pasangan nomor urut 01 mendapat porsi yang jauh lebih besar, yakni 78%. Sedangkan pasangan nomor urut 02 hanya mendapat porsi 7%. Sisanya, sebanyak 15% berisi berita netral. Seperti diketahui, pemilik Metro TV Surya

Paloh, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, adalah pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ross Tapsell (2019) menyebutkan bahwa ada tiga tren besar yang muncul berkenaan dengan oligarki media di Indonesia. Pertama, pemilik media menjadi lebih kuat secara politik. Kedua, pemilik media umumnya semakin kaya. Ketiga, perusahaan media menjadi makin menyerupai dinasti. Banyak anak pemilik media duduk di ruang redaksi dengan jabatan sebagai CEO media digital atau pemimpin redaksi. Hasilnya adalah media arus utama di Indonesia menjadi jauh lebih partisan.

Realita yang dipaparkan di atas menjadi gambaran bahwa kepentingan pemilik media—bisa berupa kepentingan politik atau bisnis—berpotensi memunculkan konflik kepentingan, yang berdampak pada produk pers.

Ishadi SK pun menyimpulkan, “Pada akhirnya jurnalis sekarang ini harus bekerja dalam dua tekanan yang saling bertentangan secara kuat. Di satu sisi adalah tekanan hati nurani yang tercermin dalam semangat idealisme. Semangat ini mendorongnya menyampaikan fakta secara jujur dan objektif. Tekanan satunya adalah kenyataan bahwa media adalah entitas bisnis serta industri yang tergantung pada semangat bisnis yang kuat” (2014, h. 5).

Dalam tulisan *Social Control in The Newsroom*, Breed (1955) mengatakan, ada suatu kebijakan redaksi yang harus dipatuhi di setiap surat kabar. Penerbit surat kabar sebagai pemilik modal atau representasi pemilik modal mempunyai hak untuk menetapkan dan memaksakan kebijakan redaksi.

Dengan kondisi seperti itu, independensi pers Indonesia masih menjadi persoalan. Beers (2006) mendefinisikan independensi media sebagai ketidaktundukan pada tekanan terkait kepemilikan perusahaan

yang dominan. Tapsell (2012) menyatakan bahwa jurnalis di Indonesia masih berjuang untuk bisa menjalankan peliputan secara bebas. Jika mereka ingin memenuhi fungsi utama jurnalis dalam demokrasi — mengkritik orang kaya dan penguasa — maka mereka membutuhkan tingkat otonomi untuk melakukannya tanpa tekanan atau ketakutan akan ditegur atau dipecat.

Intervensi pemilik media terhadap kebijakan redaksi bisa berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan publik, yakni tergesurnya ruang publik (*public sphere*). Komersialisasi media, menurut Bolin (2014) membawa pengaruh negatif pada jurnalisme dan karenanya merusak ruang publik.

Persoalan lain yang dihadapi pers Indonesia adalah mengenai profesionalisme jurnalis. Dengan semakin menjamurnya media dalam berbagai platform, kebutuhan akan jurnalis yang berkualitas semakin sulit terpenuhi. Tentu akan sulit juga menghasilkan produk jurnalisme yang berkualitas. Manzella (2000) menyatakan, seiring dengan dibukanya kebebasan pers pascakekuasaan Soeharto, salah satu tantangan pers Indonesia adalahnya banyaknya jurnalis yang kurang berpengalaman.

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa media arus utama di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi prasyarat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Tentu ini bukanlah kondisi ideal. Namun yang menggembarakan, masih ada segelintir media yang mampu menjalankan fungsi kontrol sosial

Program Mata Najwa dan Jurnalisme Berdampak

Program Mata Najwa pertama kali tayang pada 25 November 2010 di Metro TV. Ketika itu, Mata Najwa memang diproduksi oleh Metro TV. Kehadiran program Mata Najwa bermula ketika Metro

TV mendorong para presenter senior untuk membuat program acara dengan mengusung nama dan karakteristik diri sendiri. Seperti dipaparkan Ariyanto (2012), Najwa Shihab diandalkan untuk *host* program talkshow, yang kemudian diberi nama Mata Najwa.

Tayangan Mata Najwa di Metro TV berakhir pada 23 Agustus 2017, menyusul pengunduran diri Najwa Shihab dari Metro TV. Selanjutnya Najwa—bersama Catharina Davy dan Dahlia Citra Buana— mendirikan media online Narasi TV, dan kembali memproduksi program Mata Najwa. Selain ditayangkan secara online, Mata Najwa juga ditayangkan di Trans 7 sejak 10 Januari 2018.

Mata Najwa, sebagai program talkshow yang diproduksi oleh lembaga pers, dapat dikategorikan sebagai produk jurnalistik, karena telah menjalankan fungsi pers seperti diatur dalam UU 40 Tahun 1999 tentang Pers. Prasetyo (2018) menyatakan, program talkshow menjadi bagian dari jurnalisme kalau memang menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme. Menurutnya, fungsi jurnalisme diamanatkan dalam UU 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu menjalankan fungsi pendidikan kepada publik, menyampaikan hal-hal faktual yang perlu diketahui publik, memberikan hiburan dan menyampaikan kritik sosial.

Program Mata Najwa lebih fokus pada tema-tema politik dan hukum. Dalam mengangkat tema-tema aktual, program ini kerap memperlihatkan peran kontrol sosial, terutama dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi. Bahkan seringkali membawa dampak terhadap pemangku kebijakan. Sebagai contoh, pada tayangan edisi 25 Mei 2011, Mata Najwa menampilkan pengakuan Wa Ode Nurhayati, anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PAN, tentang kejahatan anggaran oleh DPR. Tayangan ini membuat Badan Kehormatan DPR bergerak, dengan melakukan pemeriksaan terhadap orang-

orang yang diduga terlibat. Tayangan Mata Najwa yang juga berdampak pada pemangku kebijakan adalah ketika membongkar praktik suap dan pengaturan skor di PSSI.

Jurnalisme yang membawa pengaruh terhadap kebijakan bisa disebut sebagai jurnalisme berdampak. Dalam buku *Jurnalisme Liputan 6: Antara Peristiwa dan Ruang Publik*, Tim Redaksi LP3ES (2006) mengemukakan, jurnalisme dampak menyangkut segala aspek. Sebuah keputusan politik yang ditengarai merugikan publik, misalnya, dapat dibatalkan akibat peliputan televisi yang terus menerus tentang peristiwa itu.

Masih di buku yang sama, Tim Redaksi LP3ES (2006) menyebutkan bahwa jurnalisme dampak tidak selalu berbicara tentang sebuah perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, jurnalisme dampak itu, secara sosial, justru menyentuh berbagai sisi kemanusiaan yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Saat diwawancarai penulis, Content Manager Narasi TV, Laban Abraham, menegaskan bahwa program Mata Najwa menekankan pada jurnalisme berdampak. Artinya, program ini dipadukan dengan mekanisme kerja jurnalistik yang diharapkan bisa membawa dampak, berupa pengaruh terhadap kebijakan.

“Kita memang pengennya tuntas. Selama ini kan talkshow dipandang sebagai talk and show doang. Kami ingin menggabungkan unsur jurnalis di mana kita jangan cuma adu gagasan di sini. Tapi kita menghadirkan fakta yang bisa berpengaruh pada kebijakan. Memang sulit, tapi itu standar. Itulah sebabnya tim Mata Najwa bisa dan kuat di riset. Tim risetnya aja empat orang. Itu bukti bahwa kita melaksanakan serius” (Laban Abraham, Wawancara, 21 Mei 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Moleong (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis deskriptif. Menurut Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Sehingga dalam penelitian ini tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan variabel yang diteliti, namun menggambarkan kondisi dengan apa adanya.

Sedangkan Rakhmat (2014) menyatakan bahwa penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediktif.

Metode kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa, yaitu melalui penelitian survei atau penelitian observasional, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggambarkan variabel demi variabel, mengumpulkan data melalui observasi dan suasana alamiah (Krisyantono, 2006).

Efektivitas kebijakan redaksi program Mata Najwa dalam membongkar

kasus suap di tubuh PSSI menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini. Seperti telah diuraikan sebelumnya, kebijakan redaksi adalah pertimbangan (*judgement*) di lingkup redaksi yang dijadikan acuan dalam menyikapi suatu fenomena atau peristiwa, dan diwujudkan dalam suatu mekanisme kerja jurnalistik. Tayangan Mata Najwa – sebagai produk jurnalisme—merupakan pengejawantahan dari suatu kebijakan redaksi. Untuk itu, penelitian difokuskan pada faktor-faktor yang menunjang efektivitas kebijakan redaksi program Mata Najwa, sehingga berhasil membongkar kasus suap dan pengaturan skor di tubuh PSSI, serta berdampak pada kebijakan di bidang penegakan hukum.

Pada tahap pengumpulan data, penulis melakukan pengamatan terhadap tayangan Mata Najwa bertajuk *PSSI Bisa Apa* dan *PSSI Bisa Apa Jilid 2*, yang ditayangkan di Trans 7 pada 28 November 2018 dan 19 Desember 2018. Kedua tayangan tersebut juga dapat diakses di *Youtube*, pada *channel* Mata Najwa. Selain itu, penulis juga mewawancarai Content Manager Narasi TV Laban Abraham, serta mengamati konten akun Instagram Mata Najwa yang sesuai dengan topik penelitian.

Dalam penelitian deskriptif, menurut Rakhmat (2014), peneliti terjun ke lapangan tanpa dibebani atau diarahkan oleh teori. Ia tidak bermaksud menguji teori sehingga perspektifnya tidak tersaring. Ia bebas mengamati objeknya, menjelajah, menemukan wawasan-wawasan baru sepanjang jalan.

ANALISIS PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian ini, penulis memaparkan hasil pengamatan terhadap tayangan Mata Najwa edisi *PSSI Bisa Apa* dan *PSSI Bisa Apa Jilid 2*, yang ditayangkan di Trans 7 pada 28 November 2018 dan 19 Desember 2018. Pengamatan difokuskan

pada upaya pengungkapan praktik suap dan pengaturan skor di tubuh PSSI. Setelah itu, penulis mengamati dampak penyangan kedua episode tersebut, berdasarkan laporan dalam akun Instagram Mata Najwa. Untuk menjabarkan kebijakan redaksi Mata Najwa, penulis juga mewawancarai Content Manager Narasi TV, Laban Abraham.

Berikut ini hasil pengamatan penulis terhadap tayangan Mata Najwa mengenai upaya pengungkapan praktik suap dan pengaturan skor di tubuh PSSI:

Mata Najwa Edisi PSSI Bisa Apa (28 November 2019)

Pada edisi ini, Mata Najwa menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu: Januar Herwanto (Manajer Madura FC), M. Saadan Abidin (Ketua Harian Aceh United), Fakhri Husaini (mantan Pelatih Timnas U-16), Bambang Suryo (mantan pelaku pengaturan skor), Hery Kiswanto (mantan Pelatih PSS Sleman), Gatot Dewa Broto (Sesmenpora), serta dua anggota Komite Eksekutif PSSI Gusti Randa dan Refrizal. Di bagian awal edisi ini, presenter Najwa Shihab bertanya kepada Januar Herwanto soal kasus pengaturan skor. Januar mengungkapkan bahwa dirinya pernah diminta oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Hidayat, agar tim Madura FC mengalah dalam pertandingan melawan kesebelasan Sleman FC pada Liga 2 PSSI. Januar dijanjikan mendapat imbalan uang hingga Rp 150.000.000 saat tim yang dipimpinnya akan bertanding melawan Sleman FC.

Tim Mata Najwa pun langsung menghubungi Hidayat untuk meminta konfirmasi. Melalui sambungan telepon, Hidayat membantah tuduhan yang dilontarkan Januar. Bahkan, Hidayat menyatakan bersedia mengundurkan diri jika terbukti melakukan pengaturan skor.

Bambang Suryo, mantan pelaku pengaturan skor, menegaskan bahwa praktik

pengaturan skor di liga sepak bola Indonesia memang ada. Menurutnya, nilai pengaturan skor mencapai ratusan juta rupiah, bahkan hingga Rp 300.000.000. Ia juga mengungkapkan adanya bandar dari luar negeri yang ikut mengatur skor. Bambang Suryo juga menyebut nama Vigit Waluyo yang selalu berhubungan dengan bandar dari luar negeri. Namun dua Anggota Komite Eksekutif PSSI, Gusti Randa dan Refrizal, mengaku tidak mengenal Vigit Waluyo. Gusti Randa menyatakan akan bertindak tegas terhadap mafia sepak bola di tanah air.

Pada edisi ini, Mata Najwa juga menayangkan rekaman percakapan antara dua orang tentang upaya pengaturan skor dalam pertandingan Liga 2, antara Aceh United melawan PSMP Mojokerto. Terkait dengan ini, ditayangkan juga cuplikan rekaman pertandingan antara Aceh United melawan PSMP Mojokerto, yang dianggap penuh kejanggalan. Seperti terlihat dalam rekaman, ketika dilakukan tendangan pinalti, penendang bola tampak seperti sengaja mengarahkan bola ke samping gawang sehingga tidak terjadi gol. Fakhri Husaini, mantan pelatih Timnas U-16, menilai, tendangan itu memang janggal. Kejanggalan ini dianggap menguatkan dugaan terjadinya pengaturan skor. Namun ketua harian Aceh United, M. Saadan Abidin, mengaku tidak tahu menahu mengenai dugaan adanya pengaturan skor.

Mata Najwa Edisi PSSI Bisa Apa Jilid 2 (19 Desember 2019)

Di edisi ini, narasumber yang dihadirkan di program Mata Najwa adalah: Lasmi Indrayani (Manajer Persibara Banjarnega), Budhi Sarwono (Bupati Banjarnegara yang juga ayah dari Lasmi Indrayani), Bambang Suryo (mantan pelaku pengaturan skor), Kletus Marselinus Gabhe (Pelatih PS Ngada), Andi Darussalam Tabusalla (mantan Ketua Badan Liga

Indonesia), Tito Karnavian (saat itu menjabat sebagai Kapolri), Imam Nahrawi (saat itu menjabat sebagai Menpora), serta seorang pegiat sepakbola yang identitasnya dirahasiakan.

Pada tayangan ini, Mata Najwa kembali membeberkan kasus pengaturan skor di Liga 2 PSSI. Lasmi Indrayani dan Budhi Sarwono mengaku diminta untuk menggelontorkan uang kepada petinggi federasi sepak bola demi mendongkrak tim Persiba Banjarnegara promosi ke Liga 1. Total uang yang sudah disetorkan mencapai Rp 1,3 miliar. Mereka membawa bukti transfer dan menyebut sejumlah nama, mulai dari wasit hingga pejabat PSSI. Di antara nama yang disebutkan meminta uang adalah Johar Lin Eng, Anggota Komite Eksekutif PSSI Pusat yang juga Ketua PSSI Asprov Jawa Tengah, serta Mbah Putih –sebutan untuk Anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto.

Sementara itu, Bambang Suryo kembali membeberkan keterlibatan bandar pengaturan skor dari luar negeri. Ia juga membawa dokumen yang disebutnya sebagai bukti. Sementara, pegiat sepak bola – identitasnya dirahasiakan— membeberkan keterlibatan Vigit Waluyo dalam pengaturan skor. Ini dilengkapi dengan diperdengarkannya rekaman percakapan Vigit Waluyo terkait dugaan pengaturan skor.

Tito Karnavian, yang saat itu menjabat sebagai Kapolri, memberikan respon atas pengakuan narasumber terkait praktik suap dan pengaturan skor dalam pelaksanaan liga sepak bola Indonesia. Menurutnya, itu akan dijadikan pintu masuk bagi kepolisian untuk melakukan pengusutan. Tito juga menegaskan bahwa kepolisian membentuk satgas khusus untuk menangani kasus-kasus ini.

Selain menghadirkan para narasumber di studio, Mata Najwa juga

mengirimkan tim liputan ke Medan, Sumatera Utara, untuk mewawancarai Edy Rahmayadi, yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Gubernur Sumatera Utara. Pada kesempatan itu, Edy Rahmayadi menegaskan bahwa dirinya punya iktikad untuk memberantas mafia sepak bola. Edy juga menyatakan, jika ada jajaran Komite Eksekutif atau pengurus di PSSI yang terlibat pengaturan skor, akan langsung diberhentikan. Ia juga berencana membentuk tim khusus yang independen untuk menangani kasus ini.

Perkembangan Setelah Penayangan Mata Najwa

Setelah penayangan program Mata Najwa yang mengangkat kasus suap dan pengaturan skor di tubuh PSSI, terjadi rangkaian peristiwa yang merupakan dampak dari pengungkapan kasus tersebut. Berikut ini beberapa peristiwa, yang penulis rangkum dari akun Mata Najwa di *Instagram*:

- 25 November 2018, Mata Najwa menayangkan episode *PSSI Bisa Apa*.
- 3 Desember 2018, Anggota Komite Eksekutif PSSI Hidayat mengundurkan diri. Sebelumnya, dalam program Mata Najwa, Hidayat disebut terlibat dalam upaya pengaturan skor. Pada saat itu, Hidayat juga berjanji akan mengundurkan diri jika dirinya terbukti terlibat.
- 19 Desember 2018, Mata Najwa menayangkan episode *PSSI Bisa Apa Jilid 2*.
- 21 Desember 2018, Satgas Antimafia Bola dibentuk dan diketuai oleh Brigjen Polisi Hendro Pandowo dan Wakil Satgas Brigjen Polisi Krishna Murti, dengan 145 Anggota. Sebelumnya, saat tampil di program Mata Najwa, Kapolri berjanji akan membentuk Satgas.

- 27 Desember 2018, Satgas Antimafia Bola menangkap Anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Ling Eng di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Sebelumnya, dalam tayangan Mata Najwa, Johar Ling Eng disebut telah meminta uang untuk pengaturan skor pertandingan.
- 28 Desember 2018, Anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih ditangkap di Yogyakarta. Sebelumnya, ia sempat disebut dalam tayangan Mata Najwa sebagai pihak yang meminta uang untuk pengaturan skor pertandingan.
- 28 Desember 2018, Vigit Waluyo menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dalam tayangan Mata Najwa, Vigit Waluyo disebut sebagai orang yang berperan dalam pengaturan skor, dan berhubungan dengan bandar dari luar negeri.
- 14 Januari 2019, Satgas menetapkan lima tersangka baru kasus pengaturan skor.
- 20 Januari 2019, PSSI menggelar kongres di Bali. Di kongres ini, Edy Rahmayadi mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PSSI dan digantikan Joko Driyono sebagai Plt Ketua Umum PSSI.
- 24 Januari 2019, Vigit Waluyo diperiksa oleh Satgas Antimafia Bola.
- 24 Januari 2019, Joko Driyono diperiksa oleh Satgas Antimafia Bola.
- 30 Januari 2019, Kantor PSSI di Jakarta digeledah Satgas Antimafia Bola.
- 1 Februari 2019, Kantor PSSI di Jakarta kembali digeledah Satgas Antimafia Bola. Satgas menemukan sejumlah dokumen yang diduga sengaja dirusak.

- 9 Februari 2019, Satgas Antimafia Bola menetapkan tiga tersangka pencuri dan perusak barang bukti.
- 14 Februari 2019, Joko Driyono ditetapkan sebagai tersangka ke-15.
- 25 Maret 2019, polisi menahan Joko Driyono.

Perumusan Kebijakan Redaksi Program Mata Najwa

Seperti telah dipaparkan sebelumnya, program Mata Najwa menekankan pada jurnalisme yang berdampak. Mekanisme kerja jurnalistik diterapkan dalam program ini dan dimaksudkan untuk membawa dampak berupa pengaruh terhadap kebijakan. Tentu saja, itu dirumuskan dalam suatu kebijakan redaksi, di mana sidang redaksi memutuskan tema dan angle (sudut pandang) yang akan diangkat, narasumber yang akan dihadirkan, serta mekanisme penayangan.

Tema-tema yang diangkat dalam program Mata Najwa diputuskan melalui rapat redaksi yang dilaksanakan dua kali dalam sepekan, yakni setiap Jumat dan Senin. Rapat redaksi ini diikuti oleh produser, asisten produser, tim riset, content manager, pemimpin redaksi, serta Najwa Shihab selaku host program. Dalam rapat redaksi, para peserta rapat mengusulkan sejumlah tema untuk diangkat dalam program Mata Najwa. Selanjutnya para peserta rapat akan membuat keputusan bersama tentang tema yang akan diangkat. Setelah suatu tema disepakati, maka akan ditentukan angle (sudut pandang), narasumber yang akan dihadirkan, serta konsep tayangan.

Peserta rapat memiliki kebebasan dalam memutuskan tema yang akan diangkat di program Mata Najwa. Saat diwawancarai penulis, Content Manager Narasi TV, Laban Abraham, menyatakan bahwa dalam penentuan tema atau narasumber yang akan dihadirkan, tim redaksi tidak mendapatkan tekanan atau intervensi, baik dari pihak luar

maupun dari pemilik Narasi TV. Termasuk pada saat Mata Najwa mengangkat tema korupsi di tubuh PSSI. Meski begitu, program Mata Najwa kerap menyesuaikan dengan segmen penonton Trans 7, yang didominasi segmen level menengah.

“Bahwa kita menyesuaikan dengan langgam kebutuhan Trans 7, kan segmennya beda. Misalnya Metro TV segmennya B+ sampai A+. Sementara kalau Trans 7 jelas bahwa kebanyakan B dan C. Bukannya *upper*, tapi *midlevel*. Di beberapa hal, walaupun isinya sangat elitis, maka kami punya kepentingan untuk *men-drive* atau memberi *treatment* itu lebih ke level audien Trans 7. Mau tidak mau, kita menyesuaikan” (Laban Abraham, Wawancara, 21 Mei 2020).

Menurut Abraham, independensi, profesionalisme jurnalis, eksklusivitas, serta kekuatan riset menjadi prasyarat bagi efektivitas kebijakan redaksi sehingga menghasilkan produk jurnalisme yang berdampak.

Analisa Atas Kebijakan Redaksi dan Tayangan Mata Najwa Episode PSSI Bisa Apa dan PSSI Bisa Apa Jilid 2

Hasil pengamatan yang dipaparkan di atas semakin menegaskan bahwa tayangan Mata Najwa edisi *PSSI Bisa Apa* dan *PSSI Bisa Apa Jilid 2* membawa pengaruh pada kebijakan hukum, di mana Polri membentuk Satgas Antimafia Bola. Ini kemudian berdampak pada perubahan di tubuh PSSI, di mana pejabat-pejabat PSSI yang terlibat dalam pengaturan skor ditangkap oleh polisi. Sehingga, PSSI pun melakukan pergantian kepengurusan.

Mata Najwa dapat dikatakan sebagai media atau program yang memelopori pengungkapan praktik suap dan pengaturan

skor di PSSI melalui produk jurnalisme *in depth* (mendalam) dan komprehensif. Ini terlihat dari informasi-informasi eksklusif yang hanya muncul di Mata Najwa edisi *PSSI Bisa Apa* dan *PSSI Bisa Apa Jilid 2*. Informasi eksklusif itu antara lain: pengakuan narasumber tentang modus-modus suap dalam pengaturan skor, rekaman pembicaraan telepon, serta dokumen dan bukti-bukti transfer uang untuk pengaturan skor. Bahkan, pernyataan Kapolri untuk membentuk Satgas Antimafia Bola disampaikan dalam program Mata Najwa. Kapolri juga menegaskan bahwa pengakuan-pengakuan yang muncul di program Mata Najwa menjadi pintu masuk bagi polisi untuk mengusut kasus pengaturan skor. Ini menjadi indikator yang kuat tentang hubungan sebab akibat, antara pengungkapan kasus suap dan pengaturan skor yang dilakukan Mata Najwa dengan penegakan hukum yang dilakukan kepolisian atas kasus ini.

Alasan untuk mengangkat tema korupsi PSSI pernah dikemukakan Najwa Shihab di Narasi TV melalui channel *Kejar Tayang*. Menurut Shihab (2019), program Mata Najwa mengangkat kasus pengaturan skor, karena keresahan terhadap pengaturan skor dan mafia bola semakin lama semakin terasa, sehingga harus disuarakan.

Tayangan Mata Najwa yang mengangkat kasus korupsi di tubuh PSSI merupakan pengejawantahan dari suatu kebijakan redaksi. Dari hasil pengamatan, penulis berpendapat ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan redaksi program Mata Najwa dalam membongkar kasus korupsi di tubuh PSSI, yaitu:

1. Independensi.

Dalam tayangan edisi *PSSI Bisa Apa* dan *PSSI Bisa Apa Jilid 2*, terlihat sekali bahwa tim redaksi Mata Najwa memiliki kemerdekaan dalam mengungkap praktik suap dan

pengaturan skor di PSSI. Mereka bisa dengan leluasa membeberkan modus, serta bukti praktik suap dan pengaturan skor. Seperti ditegaskan Content Manager Narasi TV, Laban Abraham, yang diwawancarai penulis, tim redaksi Mata Najwa memiliki kebebasan dalam membuat keputusan. Mereka juga tidak mendapatkan intervensi, baik dari pemilik media maupun dari pihak luar. Di Narasi TV, lembaga yang memproduksi program Mata Najwa, ada GDP Venture dan Go-Venture yang ikut berinvestasi. Narasi TV sendiri didirikan oleh tiga orang yang semuanya berlatar belakang jurnalis, yaitu: Najwa Shihab, Catharina Davy, dan Dahlia Citra Buana. Najwa Shihab dan Catharina Davy tercatat juga sebagai pemilik Narasi TV. Latar belakang mereka sebagai jurnalis menjadi kelebihan tersendiri, karena akan ada kesesuaian visi dengan kebijakan redaksi.

2. Kredibilitas Program.

Tayangan Mata Najwa edisi *PSSI Bisa Apa* dan *PSSI Bisa Apa Jilid 2* banyak menampilkan narasumber, informasi, serta bukti-bukti eksklusif, yang hanya muncul di Mata Najwa. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari para narasumber dan informan terhadap program Mata Najwa, sekaligus mencerminkan kredibilitas program Mata Najwa.

3. Profesionalitas Tim Redaksi.

Tim Mata Najwa menunjukkan kerja yang profesional, saat penayangan edisi *PSSI Bisa Apa* dan *PSSI Bisa Apa Jilid 2*. Profesionalitas ini mencakup profesionalitas kerja jurnalisme, kedalaman riset, serta

eksklusivitas narasumber. Semua informasi dan data yang masuk selalu diverifikasi. Redaksi Mata Najwa memang telah berusaha memperkuat tim riset, dengan mengerahkan empat orang tenaga riset. Mata Najwa juga selalu melakukan *covering both sides* (menampilkan dua sisi), yakni kepada pihak yang membeberkan kasus suap, serta kepada pihak yang dituduh terlibat suap. Ini, antara lain, terlihat ketika salah seorang narasumber menuding Anggota Komite Eksekutif PSSI Hidayat sebagai pelaku pengaturan skor. Pihak Mata Najwa pun langsung menghubungi Hidayat via telepon untuk meminta konfirmasi. Begitu juga saat Edy Rahmayadi (ketika itu Ketua Umum PSSI) tidak bisa datang ke studio Mata Najwa, tim peliput dikirim ke Medan untuk mewawancarai Edy Rahmayadi. Dengan demikian, akurasi serta keseimbangan informasi selalu terjaga.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Di tengah banyaknya tantangan, program Mata Najwa tetap bisa menjalankan fungsi kontrol sosial, memberikan koreksi atas penyimpangan wewenang di lembaga publik dan lembaga pemerintah. Bahkan tayangan Mata Najwa bisa mempengaruhi kebijakan. Peran ini ditunjukkan ketika Mata Najwa mengangkat kasus suap dan pengaturan di PSSI dalam tayangan bertajuk *PSSI Bisa Apa* dan *PSSI Bisa Apa Jilid 2*.

Tayangan Mata Najwa yang mengangkat kasus korupsi PSSI merupakan pengejawantahan dari suatu kebijakan redaksi. Adapun faktor-faktor yang

menunjang efektivitas kebijakan redaksi program Mata Najwa dalam membongkar kasus korupsi di PSSI adalah: independensi, kredibilitas program, serta profesionalitas tim redaksi yang di dalamnya mencakup profesionalitas kerja jurnalis, kedalaman riset dan eksklusivitas narasumber.

Faktor-faktor yang menunjang efektivitas kebijakan redaksi program Mata Najwa dalam membongkar kasus korupsi di tubuh PSSI, yang dipaparkan dalam penelitian ini, diharapkan bisa menjadi referensi tentang kondisi ideal yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi pers, terutama fungsi kontrol sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, Y. (2012). *Jurnal Berkisah: Memetik Inspirasi Perjalanan Karier 10 Jurnalis*.
Terkemuka Indonesia. Solo: Tiga Serangkai.
- Baran, S. J. dan Dennis K. D. (2013). *Mass Communication Theory, Foundations, Ferment, and Future*. Stamford USA: Cengage Learning.
- Beers, D. (2006). *The Public Sphere and Online, Independent Journalism*. *Canadian Journal of Education*, 29(1), 109-130, doi: 10.2307/20054149
- Bolin, G. (2014). *Television Journalism, Politics, and Entertainment*. *Television & New Media*, 15(4), 336-349. doi: 10.1177/1527476414525671
- Breed, W. (1955). *Social control in the newsroom: A functional analysis*. *Social forces*, 33(4), 326-335, doi: 10.2307/2573002
- Ishadi S. K. (2014). *Media & Kekuasaan, Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*.
Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Komisi Penyiaran Indonesia. (2019). KPID DKI Jakarta Panggil Metro TV Terkait Pemberitaan Tak Berimbang. Diakses tanggal 12 Januari 2020, dari <http://www.kpi.go.id/index.php/id/mum/38-dalam-negeri/35014-kpid-dki-jakarta-panggil-metro-tv-terkait-pemberitaan-tak-berimbang>
- Krisyantono, R. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Shihab, N. (2019). Sepak Bola Milik Kita #KITABISAAPA. Diakses tanggal 13 Januari 2020 dari <https://www.narasi.tv/kejar-tayang/sepak-bola-milik-kita-kitabisaapa>
- Manzella, J. C. (2000). Negotiating The News: Indonesian Press Culture And Power During The Political Crises Of 1997–8. *Journalism*, 1(3), 305-328, doi: 10.1177/146488490000100303
- Prasetyo, Y. A. (2018). Dewan Pers Memandang ILC Bukan Produk Jurnalistik, Ini Klarifikasinya. Diakses pada tanggal 12 Januari 2020, dari <https://matranews.id/dewan-pers-memandang-ilc-bukan-produk-jurnalistik-ini-klarifikasinya/>
- Rakhmat, J. (2014). Metode Penelitian Komunikasi, Dilengkapi Contoh Analisis Statistik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Reporters Without Borders. (2020). 2020 World Press Freedom Index. Diakses pada tanggal 29 Mei 2020, dari <https://rsf.org/en/ranking>
- Rusadi, U. (2015). Kajian Media, Isu Ideologis dalam Perspektif , Teori, dan Metode. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukmadinata, N. S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tapsell, R.. (2012). Politics and the Press in Indonesia. *Media Asia*, 39(2), 109-116, doi: 10.1080/01296612.2012.11689925
- Tapsell, R. (2019). Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital. Tagerang Selatan: Marjin Kiri.
- Tebba, S. (2005). Jurnalistik Baru. Jakarta: Kalam Indonesia.
- Tim Redaksi LP3ES. (2006). Jurnalisme Liputan 6: Antara Peristiwa dan Ruang Publik. Jakarta: Pustaka LP3ES.